

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Charlota Stella Kakisina
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya. Permasalahan hanya dibatasi pada variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data *time series* kurun waktu 2010 – 2014. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data diolah merupakan data sekunder.

Dari hasil analisis, diperoleh nilai adjust R^2 sebesar 0,85 artinya 85% variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas (jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi), sedangkan 15% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya. Sementara variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya.

Kata kunci : *tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003), Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus mendapat penanganan yang tepat agar segera dapat diatasi. Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar tentu tidak terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang banyak tinggal di wilayah pedesaan yang sulit untuk diakses bahkan di kota-kota besar juga banyak dijumpai masyarakat miskin.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (www.bappenas.go.id)

Dalam mewujudkan tujuan negara, pemerintah secara terus menerus telah melakukan program pembangunan nasional. Dua sasaran utama yang selalu mendapat perhatian dalam program pembangunan nasional adalah pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Pada masa pemerintahan orde baru, upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dapat dikatakan cukup berhasil, namun setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1996 angka kemiskinan dan pengangguran meningkat kembali sehingga hasil kinerja terhadap dua sasaran pembangunan tersebut, hasilnya belum menggembirakan. Kemiskinan di Indonesia sampai

saat ini masih terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan, bahkan sekarang ini dapat dikatakan semakin memprihatinkan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara, lebih dari 71 persen merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus, karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Pulau Papua merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, namun kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan. Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah 319.036 Km² atau sebesar 16,70 persen dari keseluruhan luas Indonesia. Wilayah seluas ini hanya dihuni oleh 2,8 juta penduduk (SP2010). Hal ini berarti setiap satu kilometer persegi hanya dihuni oleh 9 jiwa. Suatu tingkat kepadatan yang sangat sedikit dan merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan terkecil di Indonesia setelah Papua Barat (8 jiwa per Km²).

Papua merupakan provinsi yang kaya akan sumber alam, baik di lautan maupun di daratan. Kekayaan alam yang ada tidak menjadikan penduduk Papua hidup dalam kecukupan. Kenyataannya banyak Penduduk Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang dirilis BPS menyebutkan tingkat kemiskinan di Papua tertinggi di Indonesia. Persentase penduduk miskin Papua pada periode Maret 2013 mencapai 31,13 persen, diikuti oleh Papua Barat (26,67 persen), dan Nusa Tenggara Timur (20,03 persen). Apabila dilihat dari sisi jumlah sasaran program pengentasan, penduduk miskin yang tinggal di tiga provinsi tersebut berturut-turut adalah 1,017 juta orang, 224 ribu orang dan 993 ribu orang. Jumlah ini memang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tiga provinsi yang terbanyak jumlah penduduk miskinnya, yaitu Jawa Timur (4,77 juta), Jawa Tengah (4,73 juta) dan Jawa Barat (4,30 juta). Namun demikian, karena Papua, Papua Barat dan NTT mempunyai kondisi geografis yang sulit dan cakupan wilayah yang luas, maka derajat kesulitan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah, baik provinsi (Pemprov) maupun kabupaten/kota (Pemkab/kot) dirasa lebih besar.

Selain masalah kemiskinan Papua yang tinggi, tantangan pengentasan kemiskinan di Papua adalah tingginya ketimpangan antar-wilayah. Kantong-kantong kemiskinan di Papua berada di Wilayah Pegunungan (WPg) Tengah Papua, dan

sebagian kecil wilayah di daerah pesisir sulit. Tingkat kemiskinan di 14 kabupaten yang berada di Pegunungan Tengah Papua persentasenya lebih dari 35 persen. Bahkan di Kabupaten Yahukimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Intan Jaya persentase penduduk yang berada di bawah GK melebihi 40 persen. Sulitnya akses transportasi menjadikan distribusi bahan makanan ke wilayah pegunungan sering terganggu, utamanya jika kondisi keamanan tidak kondusif. Tingkat pendidikan penduduk miskin yang cenderung rendah menjadikan mereka sulit ke luar dari kemiskinan. Penduduk miskin umumnya akan mewariskan kemiskinan kepada anak cucunya jika mereka tidak berpendidikan. Untuk wilayah pesisir/dataran sulit (WPS), terdapat tiga kabupaten yang tingkat kemiskinannya tinggi, yaitu di Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya, dan Supiori. Sekitar satu dari tiga penduduk yang tinggal di wilayah tersebut hidup dalam keadaan miskin (35 persen ke atas). Untuk Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya, tingginya tingkat kemiskinan di kedua wilayah tersebut dapat dipahami, mengingat masih banyak kampung-kampung di kedua wilayah tersebut yang sulit akses transportasinya. Sehingga jarang program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah sampai di daerah tersebut. Seperti Suku Baudi di Mamberamo Raya, dan distrik Kirihi serta Walani di Kabupaten Waropen. Relatif mahal biaya transportasi menuju kedua distrik menjadikan wilayah tersebut jarang tersentuh pembangunan. Utamanya yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat kampung. Untuk Kabupaten Supiori meskipun persentase penduduk miskin di wilayah ini tinggi, namun secara absolut jumlahnya sangat sedikit. Berdasarkan data yang dihimpun BPS jumlah penduduk miskin di Kabupaten Supiori pada periode Maret 2012 hanya sebesar 7220 jiwa dan merupakan yang terkecil di Papua. Untuk wilayah pesisir/dataran mudah (WPM), tingkat kemiskinan di wilayah ini lebih sedikit dibanding WPg maupun WPS. Terdapat lima kabupaten di WPM yang persentase penduduk miskinnya kurang dari 20 persen. Kabupaten tersebut adalah Merauke (12,95 persen), Kota Jayapura (15,77 persen), Jayapura (17,08 persen), Sarmi, (18,82 persen), serta Kabupaten Mimika (20,09 persen).

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di salah satu kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayawijaya.

Perumusan Masalah

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. (<http://wikipedia.com>)

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan adalah: "*The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other*". Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada "kualitas hidup" yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat.

Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada trade off antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada trade off antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang

mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Menurut Saldanha (1998) persoalan kemiskinan mengandung enam masalah pokok, yaitu:

1. Masalah kemiskinan adalah kerentanan. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani dalam jumlah besar yang memadai, akan tetapi kekeringan musim dua tahun berturut-turut akan dapat menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.

2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif yang menuntut kerja keras dalam jam kerja panjang dengan imbalan rendah. Hal ini disebabkan oleh posisi tawar menawar mereka dalam struktur hubungan produksi amat lemah. Kemiskinan dengan demikian juga berarti hubungan dependensi kepada pemilik tanah, pimpinan proyek, elit desa dan sebagainya.

3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran.

4. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi, gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

5. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka sehingga di dalam kompetisi merebut peluang dan sumber dalam masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

6. Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak didasarkan pada garis

kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi (Tambunan, 2006).

2. Kemiskinan Relatif Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan berguna untuk mengukur ketimpangan pada suatu wilayah. Kemiskinan relatif juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Pengukuran relatif diukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketimpangan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia berupa kualitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

3. Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Alfian (1980) mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. Kemiskinan struktural juga dapat diukur dari kurangnya perlindungan dari hukum dan pemerintah sebagai birokrasi atau peraturan resmi yang mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada.

4. Kemiskinan Kronis a. Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. b. Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil). c. Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

5. Kemiskinan Sementara Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya: 1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, 2) perubahan yang bersifat musiman, dan 3) bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan

non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku 23 umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Teori Kependudukan

Definisi Jumlah Penduduk Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan "penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap". Sedangkan menurut Said (2012: 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah "jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi".

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2004: 223) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Maier (Kuncoro, 1997: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam "kualitas manusia" semakin sulit;
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Telaah lain menunjukkan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertambahan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertambahan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Disisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996: 68).

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi

sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah. Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2006: 351) sebagai berikut:

- 1) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampaui cepat meskipun memang bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara;
- 3) Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negaranegara berkembang.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampaui besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. (Todaro, 2006: 259-260).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon

Kuznetz dalam Todaro, 2004). Menurut Robinson Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*.

Menurut Nafziger (Sri Aditya, 2010), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapitasuatu negara, sedangkan menurut Kuznets (Todaro, 2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. **Akumulasi modal** termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. **Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.** Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*laborforce*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. **Kemajuan Teknologi.** Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dari lembaga atau instansi pemerintah sebagai data pendukung serta data-data yang dipublikasikan melalui berbagai tulisan ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang dikumpulkan bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya khususnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Jayawijaya yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua.

Metode Analisa Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 \quad (\text{Algifari, 2000})$$

Dimana :

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X1 : Jumlah Penduduk

X2 : Pertumbuhan Ekonomi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 40 Distrik yang keseluruhannya terletak di lembah yang dikenal dengan sebutan Lembah Baliem dan dikelilingi oleh bukit dan tebing. Penduduk Kabupaten Jayawijaya berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 206.320 jiwa yang terdiri dari 104.726 jiwa penduduk laki-laki dan 101.594 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya tahun 2015 mencapai 14.82 jiwa/km², dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	Perkembangan (%)
2010	196.085	-
2011	199.258	1,62
2012	223.443	12,14
2013	203.085	-9,11
2014	204.115	0,51

Sumber: Jayawijaya Dalam Angka, 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2010 sebanyak 196.085 jiwa. Tahun 2011 meningkat menjadi 199.258 jiwa atau naik 1,62%. Pada tahun 2012 jumlah penduduk naik 12,14% atau sebanyak

223.443 jiwa. Namun tahun 2013 jumlah penduduk menurun menjadi 203.085 jiwa atau turun -9,11%. Dan selanjutnya kembali mengalami kenaikan 204.115 jiwa atau naik 0,51%.

Tabel 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014

TAHUN	PDRB (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2010	2.758.216,0	5,80
2011	2.928.555,7	6,18
2012	3.153.311,5	7,67
2013	3.383.965,4	7,31
2014	3.652.159,3	7,07

Sumber: Jayawijaya Dalam Angka, 2015

Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayawijaya tahun 2010-2014 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 2.758.216. Tahun 2011 naik menjadi Rp 2.928.555,7 atau naik 6,18%. Pada tahun 2012 PDRB

Kabupaten Jayawijaya meningkat menjadi Rp 3.153.311,50 atau naik sebesar 7,67%. Selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 3.383.965,40 atau naik 7,31%. Dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 3.625.159,30 atau naik 7,07%.

Tabel 3. Persentase Indeks Kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010-2014

TAHUN	INDEKS KEMISKINAN (%)	PERKEMBANGAN (%)
2010	41,84	-
2011	39,03	-6,72
2012	39,05	0,05
2013	41,81	7,07
2014	39,60	-5,29

Sumber: Jayawijaya Dalam Angka, 2015

Indeks kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 indeks kemiskinan sebesar 41,84% dan pada tahun 2011 turun menjadi 39,03% atau -6,72%. Pada tahun 2012 indeks kemiskinan meningkat menjadi 39,05%

atau hanya sebesar 0,05%. Selanjutnya pada tahun 2013 indeks kemiskinan meningkat menjadi 41,81% atau naik 7,07%. Dan pada tahun 2014 turun menjadi 39,60% atau sebesar -5,29%.

Tabel 4. Indeks Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014

TAHUN	INDEKS KEMISKINAN (Y)	JUMLAH PENDUDUK (X1)	PERTUMBUHAN EKONOMI (X2)
2010	41,84	196.085	5,80
2011	39,03	199.258	6,18
2012	39,05	200.443	7,67
2013	41,81	203.085	7,31
2014	39,60	204.115	7,07

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan data indeks kemiskinan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayawijaya tahun 2010 – 2014. Data pada

tabel di atas dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 19 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Multiple R	0,92
R square (R ²)	0,85
a	43,579
b1	0,001
b 2	-0,511

Sumber: Data diolah, 2016

Dari hasil regresi berganda pada tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa :

- Nilai konstanta (a) yaitu nilai indeks kemiskinan sebesar 43,58 jika jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi sama dengan 0
- Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk (X1) terhadap variabel indeks kemiskinan (Y) sebesar 0,001. Artinya jika jumlah penduduk(X1) naik satu satuan maka indeks kemiskinan(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,001. Koefisien bernilai positif artinya antara jumlah penduduk (X1) dan indeks kemiskinan hubungan positif. Kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan kenaikan indeks kemiskinan.
- Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap variabel indeks kemiskinan sebesar -0,511. Artinya jika pertumbuhan ekonomi (X2) naik satu satuan maka indeks kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,511. Koefisien bernilai negatif artinya

antara pertumbuhan ekonomi (X1) dan indeks kemiskinan hubungan negatif. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan penurunan indeks kemiskinan.

- Nilai R menunjukkan koefisien korelasi antara jumlah penduduk (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap indeks kemiskinan (Y) sebesar 0,92 atau sebesar 92%.
- Nilai R² menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel jumlah penduduk (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap indeks kemiskinan (Y) sebesar 85% sedangkan 15% dipengaruhi oleh variabel lain.
- Dari hasil analisis maka diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = 43,58 - 0,001X1 + 0,511X2$$

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya :

- Rendahnya tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki. Dengan keterampilan yang terbatas, terbatas pula pekerjaan yang dapat dilakukan. Sehingga akan mempengaruhi penghasilan.

- b. Terbatasnya lapangan pekerjaan
Keterbatasan lapangan kerja membuat seorang pencari kerja harus bersaing dengan pencari kerja lainnya yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Jika tidak bisa mendapat pekerjaan maka akan tercipta pengangguran yang akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Beban keluarga
Kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak perlu diimbangi dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Jika tidak maka dapat anggota keluarga tidak tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik dan menyebabkan kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Jika jumlah penduduk(X1) naik satu satuan maka indeks kemiskinan(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,001. Koefisien bernilai positif artinya antara jumlah penduduk (X1) dan indeks kemiskinan hubungan positif. Kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan kenaikan indeks kemiskinan. Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi (X2) naik satu satuan maka indeks kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,511. Koefisien bernilai negatif artinya antara pertumbuhan ekonomi (X1) dan indeks kemiskinan hubungan negatif. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan penurunan indeks kemiskinan. Nilai koefisien korelasi antara jumlah penduduk (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap indeks kemiskinan (Y) sebesar 0,277 atau sebesar 92%. Proporsi pengaruh variabel jumlah penduduk (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap indeks kemiskinan (Y) sebesar 85% sedangkan 15% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya yaitu : a) tingkat pendidikan; b) keterbatasan lapangan kerja dan c) beban keluarga.

Saran.

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya :

1. Pemerintah Daerah perlu terus mendorong penduduk usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun. Sehingga mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Jayawijaya. Dan juga perlu mendorong tamatan SLTA untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau mengikuti

lembaga-lembaga pelatihan yang nantinya akan memberikan bekal pendidikan yang baik dan keterampilan untuk mencari pekerjaan.

2. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu menciptakan iklim usaha yang baik untuk mendorong investor membuka usaha-usaha yang akan menumbuhkan lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga masyarakat yang mencari kerja tidak hanya menggantungkan harapan untuk bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Pemerintah memberi bantuan modal atau pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat untuk berusaha sesuai dengan keterampilan mereka sehingga dapat memberi penghasilan untuk kelangsungan hidup sebagai individu maupun keluarga.

Daftar Pustaka

- Algifari, 2000, Analisis Regresi : Teori, Kasus, dan Solusi. Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Arsyad, L, 2004, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2013, Kolaborasi Data Kemiskinan Provinsi Papua, Jayapura
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, 2012, Data Kependudukan, Kabupaten Jayawijaya -----, PDRB Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya -----, Data Kemiskinan, Kabupaten Jayawijaya -----, 2015, Data Kependudukan, Kabupaten Jayawijaya -----, PDRB Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya -----, Data Kemiskinan, Kabupaten Jayawijaya
- Hudaya, D, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Mudrajad Kuncoro, 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Prastyo, A.A, 2010, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, 2016, Manusia Papua: Membangun dan Dibangun. Jayapura
- Robinson Tarigan, 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Saldanha, J.1998. *Pertumbuhan Ekonomi, Survei Ekonomi Politik di Indonesia*. Analisis CSIS Studi Pembangunan Politik, Pertumbuhan dan Kerja Intelektual

- Sumodiningrat, G. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. IMPAC, Jakarta.
- Saputra, W.A, 2011, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Todaro, Michael P, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan. Erlangga: Jakarta.
- Tambunan, T, 2006, *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*, Pustaka Quantum, Jakarta.